

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sunaryati Hartono C.F.G, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, PSH FH UII.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 2012, *Membedah UUD 1945*, Malang, Tim UB Press.
- Rahyunir Rauf, April 2016, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan IV.
- Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta, Themis Publishing.
- Mahmuzar, 2019, *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan*, Bandung, Nusa Media.
- Rosmery Elsy, 2019, *Legislasi*, Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram, Mataram University Press.

Sobirin Malian, 2022, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.

Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Otonomi Daerah*, Palembang, Mitra Wacana Media.

Fakhry Amin, dkk., 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten, Sada Kurnia Pustaka.

Sholihin Bone, dkk., 2023, *Peran Tunggal Otorita Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara*, Samarinda, Mulawarman University Press.

Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, Oktober 2023, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish.

Amiruddin, dkk., April 2024, *Hukum Tata Negara dan Pengawasan Terhadap Kekuasaan Eksekutif*, Medan, PT Media Penerbit Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

C. Jurnal

Suparto, 2016, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat, Pekanbaru, Vol.4, No. 1.

Sunarto, 2016, *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Semarang, Jilid 45, No.2.

Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Badan Pengkajian MPR RI.

Muhammad Zaenuddin, dkk., September 2017, *Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam*, Journal of Business Administration, Vol.1, No.2.

- Supriarno dan Saptono Hadi, Agustus 2019, *Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD*, BRILIANT : Jurnal Riset dan Konseptual, Vol.4, No.3.
- Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, September 2020, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.3.
- Mohamad Roky Huzaeni dan Wildan Rofikial Anwar, 2021, *Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.3, No.2.
- Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, April 2021, *Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*, Journal of Constitutional Law, Vol.1, No.1.
- Rizki Mulyaningsih, April 2022, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.7, No.2.
- Ervin Nugrohosudin, Juni 2022, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*, Yogyakarta, Jurnal Legislatif, Vol.5, No.2.
- Evi Purnamawati, Budi Aspani, dan Dewi Mulyati, Juni 2022, *Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia*, Sol Justicia, Vol.5, No.1.
- Metho P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, 2022, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita IKN Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.5.

Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol.52, No.1.

Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W, 2022, *Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2.

Ahmad Habib Al Fikry, Agustus 2022, *Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.8.

Ricky dan Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Oktober 2022, *Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol.12, No.2.

Yusqiy Ahliyan, Desember 2022, *Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.2, No.2.

Reka Gusnaeni dan Firmansyah Putra, 2023, *Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru*, Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.3.

Henny Andriani, April 2023, *Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7.

Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa, Juli 2023, *Fungsi dan Kewenangan DPR Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Res Justitia, Vol.3, No.2.

Sarifa Niapele dan Jakobus Anakletus Rahajaan, September 2023, *Urgensi Checks and Balances Dalam Pemerintahan Daerah*, Maluku, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol.4, No.2.

Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujardi, September 2023, *Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara*, Tunas Agraria, Vol.6, No.3.

Elva Imeldatur Rohmah, November 2023, *Kritik atas Penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Mewujudkan Checks and Balances*, Riau Law Journal, Vol.7, No.2.

Mohammad Rifqi Aziz, Desember 2023, *Peran Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol.3, No.2.

Bona Fauzatil Azmi, Khairani, Dian Bakti Setiawan, Desember 2023, *Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Masa Jabatannya*, Unes Law Review, Vol.6, No.2.

I Gede Sujana, Maret 2024, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945*, Indonesian Journal of Law Research, Vol.2, No.1, hlm.10.

Nanda Herlinanur, Wahjoe Pangestoeti, Adrian Kurnia Sobana Putra, dan Rafidah Halim, Juni 2024, *Peran Amandemen UUD 1945 Dalam*

Memperkuat Sistem Check and Balance, Jurnal Ilmiah Multidisiplin,
Vol.3, No.1.

